



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ADI WIJAYA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 874061

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/104 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/126 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
3. Tanah Seluas 274 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 274.000.000
4. Tanah Seluas 326 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 326.000.000
5. Tanah Seluas 1250 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 286 m2/286 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/135 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 211.000.000

1. MOBIL, WILLYS WILLYS Tahun 1946, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI ESTRELLA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000



3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
7.000.000

4. MOTOR, HONDA 70 Tahun 1978, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 100.200.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 4.311.200.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.311.200.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.